

BAB IV

KEBIJAKAN PRIVATISASI SBY DAN PIHAK YANG DI UNTUNGKAN

Bab ini menjelaskan empat hal yaitu: pertama; Kebijakan terhadap privatisasi BUMN, pembayaran utang ke IMF serta faktor pendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi. Kedua; Menjelaskan terkait suatu pihak atau kelompok yang diuntungkan atas privatisasi BUMN di Indonesia.

A. SBY dan kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada tanggal 5 September 2005, pemerintah menetapkan kebijakan privatisasi BUMN melalui penetapan PP No. 33/2005 tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan perlunya menetapkan PP tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi (*political economic*) dan prasyarat diberikannya bantuan oleh IMF suatu negara. Seperti pernyataan bank dunia bahwa keberhasilan privatisasi tidak dapat dilepaskan dari aspek politik ekonomi. Keterlibatan lembaga legislatif serta kesiapan manajemen perusahaan yang bersangkutan akan sangat menentukan keberhasilan privatisasi selain itu untuk menyambut hadirnya era global dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan, baik

yang dikelola oleh swasta maupun BUMN untuk ditingkatkan profesionalitasnya.¹

Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK yang kala itu baru terbentuk telah membayar utang kepada IMF sebesar Rp 126,315 triliun dan pada 2005 cicilan utang pokok Rp 61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun lebih rendah Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan, karena mendapat penundaan pembayaran utang akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias. Dalam APBN 2006 untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22 triliun (4 kali lebih besar dari pada anggaran pendidikan yang dianggarkan Rp 34 triliun). Rinciannya: pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan utang pokok Rp 63,59 triliun. Jauh lebih besar daripada *opportunity lost* (selisih antara harga BBM bila dijual di luar negeri dengan harga BBM) yang diubah menjadi subsidi (sekitar Rp 95 triliun). Atas tekanan IMF mesti di kurangi sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.²

Tetapi masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya kinerja BUMN, sehingga masih ada potensi membebani fiskal karena kinerja BUMN yang berpengaruh baik disisi pendapatan maupun sisi pengeluaran negara. Selain itu belum terimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* secara utuh diseluruh BUMN. Sejak tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2006 pemerintah belum melakukan privatisasi BUMN. Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan tidak terlaksananya privatisasi BUMN adalah:

¹ Siti Maro'ah. 2008. "Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia". *Balanced Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*. Vol. 5. No. 9.

² Ishak Rafick. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Jakarta: Ufuk Publishing House. Hal 43-44.

1. Pemerintah masih berkonsentrasi pada pelaksanaan restrukturisasi melalui peningkatan kinerja perusahaan.
2. Belum adanya persepsi yang sama dari *stakeholders* BUMN mengenai manfaat privatisasi.
3. Menunggu kondisi pasar saham yang baik.³

Setelah membayar utang ke IMF ternyata privatisasi tetap dilakukan pada tahun 2006 pemerintah melakukan penjualan saham Perusahaan Gas Negara (PGN) maksimal 5,31%. Pada tahun itu juga, Presiden SBY mengeluarkan keputusan tentang komite privatisasi perusahaan Perseroan, KEPRES No. 18/2006 yang semakin menguatkan kebijakan privatisasi di Indonesia secara sistemik.⁴

Pada tahun 2007 BUMN menyumbangkan 8,5 persen dari total ekspor sedangkan untuk menyumbangkan pendapatan nasional adalah 5,3 persen. Sekitar 80 persen dari seluruh aset BUMN dipegang oleh enam BUMN saja dari sebanyak 139 BUMN. Namun pada tahun 2008 bagian terbesar dari laba seluruh BUMN dihasilkan oleh dua perusahaan saja. Di tahun yang sama tahun 2008 PT Perusahaan Listrik Negara adalah BUMN yang paling merugi yaitu senilai 1,2 miliar dollar AS. Perusahaan lain yang ikut merugi adalah; Merpati Airlines, PT Krakatau Steel, PT Pelayaran Nasional Indonesia dan Perkapalan Koja Bahari, serta PT DOK. Perkebunan-perkebunan milik negara juga termasuk di antara badan-badan usaha milik negara yang kinerjanya buruk.⁵

³ Bappenas. 2006. "*Berjuang Membangun Kembali Indonesia*". Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 48.

⁴ M. Danial Nafis. 2009. "*Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat*". Jakarta: INSIDE Press. hal. 119-120.

⁵ President and Fellows of Harvard College. 2011. "*From Reformasi to Institutional Transformation*". Harvard Kennedy School Indonesia Program. Hal 95-96

Ketika dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 2 tahun 2008 pada tanggal 4 Februari 2008 yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan yang menurut Soepriyatno bahwa peraturan pemerintah tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi 13 perusahaan yang menambang di hutan lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing raksasa, seperti Freeport dari AS, Rio Tinto dari Inggris, Inco dari Canada, dan Newcrest dari Australia. Kondisi tersebut menggambarkan minimnya kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam yang telah diprivatisasi. Namun kebijakan privatisasi ini merupakan konsekuensi dari diterimanya bantuan dana dari IMF dan Bank Dunia.⁶

Pada tahun 2009 kementerian BUMN mencatat 20 BUMN tercatat masuk daftar privatisasi, dari 20 perusahaan tersebut sebagian adalah hasil *carry over* dari program privatisasi tahun 2008. Selain itu 7 perusahaan dilakukan dengan metode penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang dan PT Sarana Karya.⁷ Namun pada tahun yang sama DPR membatalkan sebagian BUMN untuk di privatisasi karena kondisi perekonomian Indonesia. Menurut sekretaris Kementerian BUMN sudah menyiapkan dua perusahaan yang di privatisasi, yaitu PT Pembangunan Perumahan dan PT Tabungan Negara, alasannya karena kedua BUMN itu yang paling siap untuk di privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk menutup defisit APBN pada tahun 2009. Target privatisasi tahun 2009 adalah Rp 500 miliar. Namun, hasil pembahasan APBN Perubahan

⁶ Havids Agung Prakoso dan Ahmad Juhairi. 2007. "Gerakan Anti Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia". *Jurnal Sospol*. Vol 3. No. 2. Hal 115.

⁷ AA Ariwibowo. 2009. "20 BUMN masuk daftar privatisasi".

Antaraneews, 19 Februari. Tersedia Online Melalui:

<https://www.antaraneews.com/berita/132962/20-bumn-masuk-daftar-privatisasi-2009>, diakses 24 Januari 2019.

2009 antara pemerintah dan panitia anggaran DPR 16 Juli 2009 menunjukkan privatisasi dibatalkan dari rencana pembiayaan defisit.⁸

Tabel 1. Beberapa BUMN yang telah di privatisasi oleh SBY-Kalla.

NO.	BUMN	TAHUN DIPRIVATISASI	SEKTOR
1.	PT. Telkom Tbk	2006	Telekomunikasi
2.	PT. Indosat Tbk	2006	Telekomunikasi
3.	PT. PGN Tbk	2006	Gas Bumi
4.	PT. Bank Mandiri Tbk	2006	Perbankan
5.	PT. Bank BRI Tbk	2006	Perbankan
6.	PT. Bank BNI Tbk	2007	Perbankan
7.	PT. Tambang batubara Bukit Asam Tbk	2009	Batu Bara
8.	PT. Antam Tbk	2008	Pertambangan
9.	PT. Adhi Karya Tbk	2008	Konstruksi
10.	PT. Timah Tbk	2006	Pertambangan
11.	PT. Bank Bukopin Tbk	2008	Perbankan
12.	PT. Kimia Farma Tbk	2008	Farmasi
13.	PT. Indofarma	2008	Farmasi

⁸ Kompas. 2009. "Privatisasi BUMN dibatalkan". 21 Juli. Tersedia Online Melalui:

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/83149-Privatisasi%20BUMN.pdf>, diakses 24 Januari 2019.

	Tbk		
13.	PT. Jasa Marga	2007	Penyelenggara Jasa jalan Tol
14.	PT. Wijaya Karya	2007	Konstruksi
15.	PT. Merpati	2007	Penerbangan
16.	PT. Industri Soda Indonesia	2007	Kimia
17.	PT. Industri Gelas	2009	Pembuatan Gelas
18.	PT. Krakatau Steel	2008	Produksi Baja
19.	PT. Garuda Indoesia	2008	Penerbangan
20.	PT. BTN	2008	Perbankan
21.	PT. Waskita Karya	2008	Konstruksi
22.	PT. Pembangunan Perumahan	2008	Konstruksi
23.	PT. Bahtera Adiguna	2009	Transportasi
24.	PT. Rukindo	2009	Pengerukan

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dibentuk oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UKP3R lahir dari keppres nomor 17/2006 dengan ketentuan tugas selama tiga tahun yang pada saat itu diketuai oleh Marsillam Simandjuntak, salah satu tugas UKP3R ini adalah untuk peningkatan kinerja BUMN yang menurut Andi Mallarangeng tugas lainnya adalah hanya mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan pelaporan langsung kepada presiden. Di samping itu UKP3R ini berurusan langsung dengan kabinet, terutama kementerian terkait, dengan adanya UKP3R ini presiden melakukan

pengeutamaan agenda-agenda reformasi atas masukan dari UKP3R yang disesuaikan dengan kebutuhan presiden.⁹

Namun dengan dibentuknya UKP3R ini dikhawatirkan akan digunakan pihak asing untuk menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal setelah Indonesia melunasi utang kepada IMF. Menurut Zainal Arif yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPR mengatakan bahwa pihak asing yang dimaksud itu adalah Mc Kinsey and Company yang bertindak sebagai konsultan pembentukan UKP3R. Zainal mengatakan "karena setelah utang telah dilunasi kepada IMF maka tidak ada lagi lembaga asing neoliberal yang mengawasi privatisasi di Indonesia".¹⁰

Kepemilikan asing kepada perbankan nasional pada awal tahun 2006 dalam laporan tahunan, Bank Indonesia (BI) menyatakan jumlah bank yang dapat dikategorikan sebagai bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing per Desember 2005 telah mencapai 37 bank dengan pangsa total aset mencapai 39,7 % terhadap industri perbankan. Laporan BI pada tahun-tahun berikutnya tidak menyebutkan lagi perkembangan angka semacam itu. Sumber lain yang sering dikutip adalah laporan Majalah InfoBank yang menyebutkan angka 44 % kepemilikan asing pada pertengahan tahun 2007. Dominasi kepemilikan oleh asing di sektor finansial terutama di sektor perbankan membuat munculnya tingkat kerentanan jika dilihat dari perspektif perekonomian nasional. Di samping itu dominasi tersebut memang dirancang untuk mengamankan pengendalian asing terhadap indonesia, antara

⁹ Juwito. 2006. "Pembimbingan Berita UKP3R (unit kerja presiden untuk pengelolaan program dan reformasi) di surat kabar media Indonesia dan jawa pos". *Jurnal ilmu-ilmu sosial*. Vol. 6. No. 2. Hal 100.

¹⁰ *Merdeka*. 2006. "Pihak asing dibelakang UKP3R". 30 November. Tersedia Online Melalui: <https://www.merdeka.com/politik/pihak-asing-dibelakang-ukp3r-zupo69j.html>, diakses pada 11 Februari 2018.

lain dengan memudahkan pengalihan surplus ekonomi ke wilayah yang dikehendaki, mengefesienkan kegiatan-kegiatan modal asing di berbagai sektor lainnya, serta dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.¹¹

Selain itu setiap tahun ada program tahunan privatisasi yang telah dipersiapkan oleh Menteri BUMN. Menteri BUMN tidak akan melaksanakan privatisasi BUMN secara tidak terencana atau dadakan. Selanjutnya Menteri BUMN menyerahkan program privatisasi tersebut kepada Komite Privatisasi untuk mendapat arahan dan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran berjalan. Di samping itu Menteri BUMN wajib melaksanakan program tahunan privatisasi dengan berpedoman pada arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi menteri keuangan. Kemudian menteri BUMN mensosialisasikan program tahunan tersebut, kemudian Menteri BUMN mengkonsolidasikan program tahunan privatisasi kepada DPR RI.¹²

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan privatisasi BUMN terus berlanjut. Tahun 2008 pemerintah mengumumkan akan memprivatisasi 44 BUMN. Pada tahun 2009 program privatisasi telah dilakukan terhadap 30 BUMN. Dari sejumlah privatisasi BUMN yang terealisasi dalam masa pemerintahan Presiden SBY, Privatisasi Karakatau Steel menjadi privatisasi BUMN yang menuai kontroversi. Kontroversi muncul karena harga

¹¹ Awalil Rizky, dan Nasyith Majidi. 2008. *Neoliberalisme mencengkram Indonesia*. Jakarta: E Publishing. Hal 159-160.

¹² Sunaryati Hartono. 2005. "Analisisa dan Evaluasi Hukum Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara". *Bphn*, Desember. Tersedia Online Melalui:
www.bphn.go.id/data/documents/privatisasi_badan_usaha_milik_negara.pdf+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-ab, diakses 14 Januari 2019.

saham Karakatau Steel yang ditetapkan sebesar Rp 850 per lembar saham, ternyata jauh dibawah harga pasar yang mencapai Rp 1200-an per saham. Sehingga muncul berbagai spekulasi tentang privatisasi Karakatau Steel yang ujungnya merugikan negara.¹³

Namun di tahun 2008 presiden SBY menginstruksikan kepada menteri BUMN untuk melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) saham mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membantu mengurangi krisis kepercayaan di BEI. BUMN yang di instruksikan untuk melakukan pembelian kembali adalah BUMN yang mempunyai dana besar seperti PT. Bukit Asam, PT. PGN, PT. Gresik dan PT. Timah. Presiden meminta agar BUMN melakukan kebijakan sektor keuangan yang sejalan dengan program pemerintah, selain itu presiden pada saat itu mengadakan rapat guna membahas penghentian sementara perdagangan saham.¹⁴

Selain itu presiden SBY dalam mengelola BUMN lebih cenderung mengikuti kebijakan presiden sebelumnya yaitu Megawati dengan melakukan privatisasi untuk menutup defisit APBN. Privatisasi tertunda ketika krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan krisis tersebut membuat saham BUMN mengalami penurunan tajam. Di samping itu beberapa kegagalan SBY dalam pengelolaan BUMN yaitu:

1. Pemerintahan SBY gagal mengembalikan pengelolaan BUMN pada semangat demokrasi ekonomi yang sesuai

¹³ A. A Gede D.H. Santosa. 2015. "Transformasi Kertamasa dalam privatisasi Badan Usaha Milik Negara". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 1. No. 2. Hal 121.

¹⁴ Kunto Wibisono. 2008. "SBY: BUMN melakukan buy back untuk kurangi krisis kepercayaan". *AntaraneWS*, 9 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://www.antaraneWS.com/berita/119791/sby-bumn-lakukan-buy-back-untuk-kurangi-krisis-kepercayaan>, diakses pada 9 Februari 2019.

dengan pasal 33 UUD 1945. Dibuktikan dengan SBY yang melanjutkan privatisasi BUMN dengan dalih mengganti defisit APBN dan rakyat Indonesia yang bisa memiliki saham BUMN, sedangkan faktanya saham BUMN di bursa saham didominasi pihak asing.

2. Kegagalan SBY-Kalla dalam mengatasi BUMN yang sedang mengalami keterpurukan sehingga mengakibatkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK besar-besaran terhadap karyawan BUMN.¹⁵

Pengelolaan BUMN yang dilakukan SBY di pengaruhi oleh partai politik dan akibat dari intervensi tersebut kontribusi BUMN terhadap pendapatan domestik bruto pun tidak mengalami kenaikan, Seperti yang dikatakan oleh pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy "kinerja BUMN belum maksimal karena tidak bisa lepas dari intervensi politik dan SBY harus menghilangkan keterlibatan partai politik dalam pengelolaan BUMN". Selain itu pengamat ekonomi dari Banking Crisis Center yaitu Deni Darury menegaskan perlunya penghentian privatisasi BUMN karena privatisasi yang termasuk di dalam Washington konsensus justru membuat ekonomi yang boros, menurutnya untuk mendukung kemandirian ekonomi harus memperkuat dukungan ke BUMN dan bukan dengan memprivatisasi.¹⁶

Presiden gusar mendengar laporan kerugian perusahaan BUMN. Saat itu masih ada sekitar 20 BUMN yang keuangannya merosot. Selain itu banyak dana Pemerintah yang digunakan untuk menambal kerugian sejumlah BUMN. Dana tersebut dikenal sebagai penyertaan

¹⁵ Luqman Hakim. 2013. *Problem Demokrasi dan Good Governance di era reformasi*. Malang: UB Press. Hal 90-91.

¹⁶ Handr. 2009. "Noorsy: SBY harus mampu hilangkan parpol terhadap BUMN". *Antaraneews*, 22 Juli. Tersedia Online Melalui: <https://www.antaraneews.com/berita/148296/noorsy-sby-harus-mampu-hilangkan-parpol-terhadap-bumn>, diakses 10 Februari 2019.

modal pemerintah. SBY memahami gerak perusahaan BUMN ini terhambat oleh sejumlah aturan perundangan. Namun BUMN dituntut agar bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam mengambil keputusan bisnis. BUMN perlu diberlakukan sama dengan swasta. Oleh karena itu peraturan perundangan yang menghambat langkah BUMN perlu di kaji kembali. Menurut SBY, jika sebuah BUMN mengalami kerugian yang di dapat dari resiko bisnis, tidak demikian menjadi tindakan korupsi. Kecuali jika kerugian itu ternyata malah masuk kantong sendiri, ujanya.¹⁷

Fakta menunjukkan pada tahun 2008 pemodal asing telah menguasai hampir 85 persen kepemilikan saham BUMN di Indonesia dan lebih dari separuh kepemilikan perbankan, hampir 90 persen dari 137 konsesi pengelolaan lahan migas di Indonesia juga sudah dikuasai oleh korporasi asing, yang menduduki produsen migas di Indonesia 7 dari 10 besar diantaranya adalah:

1. Chevron Pacific (Amerika Serikat)
2. Conoco Philips (Amerika Serikat)
3. Total Indonesie (Prancis)
4. China National Offsgore Oil
Cooperation (Tiongkok)
5. PetroChina (Tiongkok)
6. Korea Development Company (Korea
Selatan)

¹⁷ *HukumOnline*. 2007. "Presiden: BUMN jangan Rugi Lagi". 13 April. Tersedia Online Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16513/presiden-bumn-jangan-rugi-lagi->, diakses 11 Februari 2019.

7. Chevron Company (Amerika serikat).¹⁸

B. Pendukung kebijakan privatisasi di kabinet SBY

Privatisasi dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor di kabinet SBY yang berperan agar privatisasi di wujudkan di kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di samping itu menurut pengamat hukum tata negara Saldi Isra menyebutkan bahwa orang-orang yang menduduki komisaris BUMN adalah tim pemenangan SBY, sehingga lingkup dari pengelolaan BUMN tersebut direkrut presiden berdasarkan balas jasa ketika pemilu tahun 2004 dan memang hal tersebut pun dibuktikan dengan beberapa nama yang menduduki jabatan komisaris BUMN, seperti Samsuoddin yang pada saat itu adalah Sekjen tim kampanye menjadi komisaris Jasa Marga, Umar Said ketua seksi kampanye menjadi komisaris Pertamina, dan Robik Mukav ketua Sie Pengumpulan data yang menjadi dewan pengawas TVRI. Selanjutnya ada Aam Sapulete tim khusus pemenangan SBY menjadi Komisaris PTP Lampung, Andi Arif menjabat Komisaris PT Pos, Heri Sebayang menjadi Komisaris PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Sumut, dan Yahya Ombara menjadi komisaris PT KAI.¹⁹

Menteri BUMN pada kabinet Indonesia bersatu sejak awal eksposisinya kepada publik telah mengemukakan bahwa konsep BUMN adalah restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Pilihan yang berbeda dengan teori yang

¹⁸ Fahmi Radhi, Op.Cit., Hal 6.

¹⁹ *Detiknews*. 2009. "Sarat kepentingan penguasa, pengelolaan BUMN tidak efisien". 22 Juni. Tersedia Online melalui: <https://news.detik.com/advertorial-news-block/1152294/sarat-kepentingan-penguasa-pengelolaan-bumn-tak-efisien>, diakses 12 Februari 2019.

dipergunakan menteri-menteri di pemerintahan sebelumnya yang cenderung berpola pada *market fundamentalism*, dengan pendekatan bahwa privatisasi adalah kebijakan utama BUMN.²⁰

Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di era SBY saat itu sangat mengharapkan bahwa privatisasi dilakukan pada tahun 2005 karena menurutnya privatisasi beberapa BUMN perlu segera dilakukan untuk menutupi defisit anggaran negara. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2005, pemerintah telah menetapkan penerimaan dari privatisasi BUMN sebanyak Rp 3,5 triliun. Selain itu Aburizal Bakrie menegaskan, program privatisasi BUMN harus secepatnya dilakukan untuk memenuhi target penerimaan negara dari BUMN (termasuk dividen) sebesar Rp 13 triliun. Jika langkah ini tidak diambil, bagi Aburizal, kira-kira akan didapatkan dari mana uang penggantinya. Aburizal Bakrie juga menekankan perlunya privatisasi sebab untuk mencairkan dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 250 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,4 triliun. Hal itu terjadi karena syarat pencairan dana tersebut mengharuskan adanya penerbitan peraturan pemerintah tentang privatisasi terlebih dahulu.²¹

Target privatisasi pada tahun 2006 sebanyak 10-20 BUMN hal tersebut di dukung dalam pernyataan Meneg Sugiharto (2004-2007) bahwa dengan dilakukan privatisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik sektor ril di mana BUMN sangat berperan untuk membangkitkan

²⁰ Riant Nugroho Dwijowijoto dan Ricky Siahaan. 2005. *BUMN INDONESIA: ISU, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 217-218.

²¹ Syaiful Bari. 2005. "Kontroversi Privatisasi BUMN". *Bappenas*, 23 Juni. Tersedia Online melalui: <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5852/Kontroversi%20Privatisasi%20BUMN-SK.htm>, diakses 3 Januari 2019.

ekonomi. Namun Sugiharto menolak untuk menyebutkan nama-nama BUMN yang akan di privatisasi tersebut sebagian besar merupakan perusahaan publik yang harus tunduk pada UU pasar modal. Selain itu target privatisasi yang ditetapkan dalam APBN 2006 sebesar Rp 1 triliun. Jika ditambah dengan penjualan aset dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) nilainya mencapai Rp 3,4 triliun. Mengenai privatisasi PGN, Sugiharto mengakui BUMN itu memerlukan penambahan ekuitas. Menurut Sugiharto, dalam penjualan PGN ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama, dengan melihat ekuitas pemerintah, berapa yang bisa di konversi dengan saham. Kedua, melihat kebutuhan investasinya berdasarkan proyek-proyek yang sudah disetujui.²²

Selain itu rencana Kementerian BUMN untuk meminimalisir jumlah perusahaan BUMN telah berlangsung sejak tahun 2005, saat Kementerian BUMN masih dipimpin oleh Menteri Sugiharto. Kala itu pemerintah dalam program *Master Plan* Revitalisasi BUMN 2005-2009 menargetkan akan merampingkan jumlah perusahaan BUMN dari 154 menjadi hanya 80 perusahaan selama empat tahun. Menteri Negara BUMN Sugiharto beralasan perampingan perusahaan BUMN dalam rangka efisiensi. Selain itu perampingan juga terkait ketidakmampuan pemerintah sebagai pemegang saham untuk menambah modal, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan sinergi sesama BUMN. Menurutnya ada tiga kategori proses perombakan BUMN yaitu dengan cara mempertahankan beberapa BUMN (*stand alone*), melakukan

²² *Detikfinance*. 2006. "10-20 BUMN akan di privatisasi". 4 Januari. Tersedia Online Melalui: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-512446/10-20-bumn-akan-diprivatisasi>, diakses 14 Januari 2019.

merger sesama BUMN sejenis (*roll up*), dan membentuk perusahaan induk (*holding*).²³

Pemerintah menambah jumlah perusahaan BUMN yang akan di privatisasi tahun 2007. Meneg BUMN Sugiharto sudah memberikan daftar 14 BUMN yang akan dijual kepada DPR. Sugiharto menyebut beberapa BUMN yang akan dilepas yakni BNI, Jasa Marga, Garuda Indonesia, dan Indonesia Power. Jasa Marga untuk memperkuat struktur modal, BNI untuk menambal defisit APBN, Garuda untuk penyehatan perusahaan, sementara hasil privatisasi Indonesia *Power* akan digunakan untuk modal kerja. Menurut Sugiharto harus ada 12 BUMN yang sudah *go public* di Bursa Efek Jakarta. Kapitalisasi pasar dari 12 BUMN yang sudah *go public* per 28 Desember 2006 mencapai Rp 452,69 triliun atau 36,82 persen dari total kapitalisasi pasar BEJ.²⁴

Menteri BUMN yang pada saat itu menggantikan Sugiharto adalah Sofyan Djalil, merasa perlu untuk melakukan privatisasi dengan kenaikan target Rp 4,3 triliun dapat terpenuhi melalui privatisasi PT BNI Tbk, PT Jasamarga, dan PT Wijaya Karya. Keitga BUMN tersebut merupakan perusahaan yang di ikutkan dalam jadwal perdana dari 15 BUMN yang siap di privatisasi pada tahun 2007 dengan target awal sebesar Rp 3,3 triliun. Tetapi pada tahun 2007-2008 akan dilaksanakan privatisasi pada 24 BUMN. Jumlah ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 BUMN dan jumlah ini merupakan peningkatan dari jumlah awal yang ditetapkan dalam Kep-

²³ Heronimus Ronito KS. 2015. "Alotnya merampingkan Perusahaan BUMN". *Gresnews*, 23 November. Tersedia Online Melalui: <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102190-alotnya-merampingkan-perusahaan-bumn-/>, diakses 17 Januari 2018.

²⁴ *DetikFinance*. 2007. "18 BUMN ikut di privatisasi". 3 Januari. Tersedia Online Melalui: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-726545/18-bumn-ikut-program-privatisasi->, diakses 17 Januari 2019.

03/M.Ekon/01/2007 yang di tetapkan 31 Januari 2007 yang menetapkan bahwa 9 BUMN yang masuk dalam skema privatisasi, yaitu Jasa Marga, BNI, Wijaya Karya, Merpati, Industri Soda Indonesia, Industri Gelas (Iglas).²⁵

Pada tahun 2007, ada tiga perusahaan BUMN yang berhasil di privatisasi yaitu PT. Wijaya Karya, BNI, dan PT. Jasa Marga. Pada bulan September tahun 2008, DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memprivatisasi tiga BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, PT. Krakatau Steel, dan PT. BTN. Sebelum tahun 2008, pemerintah telah berencana memprivatisasi 28 perusahaan BUMN. Jumlah tersebut naik pada awal bulan Januari menjadi 30 perusahaan. Kemudian pada pertengahan bulan Januari Meneg BUMN Sofyan Djalil menambahkan 7 perusahaan yang akan diprivatisasi menjadi 37 perusahaan. Seiring berjalannya waktu jumlah itu masih bertambah lagi sehingga total perusahaan yang akan direncanakan untuk di privatisasi ada 44 perusahaan. Namun, hingga akhir tahun 2008 semua rencana tersebut belum ada yang terealisasi, dan rencana privatisasi tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2009. Namun pada tahun 2009 jumlah tersebut menurun menjadi hanya 30 perusahaan saja yang akan di privatisasi.²⁶

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan hanya mampu memprivatisasi setengah dari target jumlah badan usaha milik negara pada 2008. Sepanjang tahun 2008, Kementerian Negara BUMN menargetkan memprivatisasi 34 badan usaha. Deputi Menteri Negara BUMN bidang restrukturisasi dan privatisasi Muhammad Yasin mengatakan "Saat ini yang sudah dibahas dan disetujui dewan perwakilan rakyat baru 13 badan usaha".

²⁵ Riant Nugroho Dwijowijoto, dan Randy R. Wrihatnolo. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 9-10.

²⁶ Anton Ramdan. 2009. *Membongkar Jaringan Bisnis Yahudi di Indonesia*. Shahara Digital Publishing. Hal 28.

Beberapa perusahaan yang telah mengantongi ijin privatisasi adalah PT Adhi Karya Tbk melalui penerbitan saham baru terbatas, PT Waskita Karya dengan penjualan saham perdana (IPO), PT Pembangunan Perumahan melalui IPO, PT Bahtera Adi Guna melalui penjualan strategis, PT Garuda Indoensia melalui IPO, PT Krakatau Steel melalui IPO), serta PT Bank Tabungan Negara melalui IPO). Enam sisanya merupakan badan usaha negara minoritas. Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengatakan bahwa tahun 2008 hanya memprivatisasi 16 perusahaan termasuk BUMN perusahaan perkebunan.²⁷

C. Faktor Pendorong privatisasi

Dorongan pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan publik atau perusahaan negara terhadap kepada pihak swasta yaitu sebagai upaya peningkatan efisiensi sektor publik sebagaimana kinerja efisiensi sektor swasta. Selain itu, harapan kemungkinan laba, insentif yang lebih tinggi, efisiensi dan berorientasi kepada konsumen merupakan berbagai dorongan tambahan bagi perusahaan yang di privatisasi. Keuntungan efisiensi akan menurunkan tingkat tarif yang perlu di bayar oleh pembayar pajak, untuk menjaga kelangsungan pelayanan perusahaan bentukan negara. Landasan utama pemerintah melakukan privatisasi karena mengadopsi gagasan-gagasan neoliberal yang pro pasar yang esensinya adalah mengurangi peran pemerintah terhadap penguasaan sektor-sektor strategis²⁸

²⁷ *Tempo*. 2008. "Tahun ini hanya 16 perusahaan BUMN yang di privatisasi". 22 September. Tersedia Online Melalui: <https://bisnis.tempo.co/read/136828/tahun-ini-hanya-16-bumn-di-privatisasi/full&view=ok>, diakses 19 Januari 2019.

²⁸ Josephus J. Pinori. 2015. "Keberadaan Privatisasi BUMN Di Indonesia". *Lex Et Societies*. Volume 3, Nomor 7. Hal 173.

Ada 4 faktor spesifik yang membuat pemerintah melakukan privatisasi BUMN di Indonesia, yaitu:²⁹

1. Pemerintah hanya sebagai pengatur dalam industri tertentu sehingga kepemilikan pemerintah di sektor BUMN harus dialihkan kepada pihak swasta untuk memberikan kesempatan daya bersaing yang sama (*level playing field*) kepada perusahaan yang bergerak dalam suatu industri tertentu. Suatu industri telah cukup kompetitif sehingga intervensi pemerintah dalam bentuk BUMN tidak diperlukan lagi karena mekanisme pasar telah berfungsi.

Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani bahwa BUMN sudah terlalu banyak terlibat dalam bisnis domestik yang sejatinya bisa dijalankan oleh para pelaku usaha swasta maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah tidak perlu lagi untuk fokus dengan aset BUMN, selain itu Rosan menilai agar pemerintah menjual aset BUMN ke kalangan swasta dalam negeri sehingga timbul sinergi antara pengusaha dalam negeri dan BUMN.³⁰

Di samping itu direktur keuangan PT Wijaya Karya Steve Koesasih mengatakan sinergi dari BUMN membutuhkan swasta, proyek dimiliki BUMN tapi ketika kerja di lapangan menggandeng BUMN. Steve menambahkan jika BUMN tidak akan mungkin bisa menyediakan segala sesuatunya sendiri dan di pihak swasta ada yang kompeten di bidangnya yang tidak bisa BUMN kerjakan sehingga BUMN dan swasta dapat bekerja sama.³¹

²⁹ Indra Bastian. 2002. *Privatisasi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 132.

³⁰ Damianus Andreas. 2017. "Kadin mengeluhkan BUMN terlalu mendominasi sektor bisnis". *Tirto*, 3 Oktober. Tersedia Melalui: <https://tirto.id/kadin-keluhkan-bumn-terlalu-mendominasi-sektor-bisnis-cxLq>, diakses 22 Februari 2019.

³¹ Wilfridus Setu Embu. 2017. "Bos Wijaya Karya Soal BUMN disebut monopoli Proyek: kita butuh swasta". *Merdeka*, 6 Oktober.

Namun menurut Jean Tirole seorang ekonom asal Prancis bahwa pasar persaingan yang tidak sempurna tidak perlu di kelola oleh pengambil kebijakan atau pemerintah jika intervensi pemerintah dalam pasar yang tidak sempurna (oligopoli) bisa menghasilkan kebijakan yang tepat maka akan bermanfaat bagi sebuah industri maupun perekonomian suatu negara. Industri nasional di Indonesia memiliki karakter pasar yang tidak sempurna sehingga peran negara tetap diperlukan tetapi dengan regulasi yang tepat, dengan regulasi yang tepat dan optimal mampu mendorong pertumbuhan suatu industri dan pertumbuhan ekonomi. Peran negara juga berkewajiban untuk mengawasi jika kebijakan industri berjalan dengan tepat dan menghindari dampak yang di dapatkan dari persaingan pasar yang tidak sempurna tersebut.³²

Pemerintah mendorong peran swasta menjadi lebih besar untuk mengembangkan usaha di industri tertentu sehingga peran pemerintah terhadap pengelolaan BUMN perlahan harus dikurangi. Seperti yang di kemukakan Luhut Binsar Panjaitan bahwa keterlibatan swasta adalah untuk membantu BUMN dalam hal pendanaan, sehingga anggaran pemerintah bisa digunakan untuk mengembangkan sektor lain. Menurut Luhut ketika pemerintah bekerjasama dengan swasta alasannya adalah untuk mendorong efisiensi pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah, terlebih agar swasta ikut berkembang.³³

Tersedia Online Melalui: <https://www.merdeka.com/uang/bos-wijaya-karya-soal-bumn-disebut-monopoli-proyek-kita-butuh-swasta.html>, diakses 23 Februari 2019.

³² Firmanzah. 2014. "Peran Regulator dan Mekanisme Pasar".

Sindonews, 27 Oktober. Tersedia Online Melalui:

<https://nasional.sindonews.com/read/916005/18/peran-regulator-dan-mekanisme-pasar-1414408331>, diakses 23 Februari 2019.

³³ Diafiyant Glienmourinsie. 2017. "Luhut: Ajak swasta kelola pelanuhan, bukan jual BUMN". *Sindonews*, 17 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://ekbis.sindonews.com/read/1249102/34/luhut->

Demikian pula dikemukakan oleh Bambang Brodjonegoro yang sekarang menjabat menjadi kepala Bappenas mengatakan bahwa peran swasta dibutuhkan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini contoh yang disebutkan Bambang adalah penyediaan listrik tidak lagi menggunakan energi fosil, tetapi menggunakan energi baru dan terbarukan yang dikelola oleh swasta.³⁴

Namun dampak dari pengelolaan swasta tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pemerintah contohnya saja seperti lahan industri yang dikelola oleh swasta yaitu Badan Layanan Umum (BLU) tetapi lahan yang tidak berkembang yang bisa dikuasai oleh BLU. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenprin) Imam Haryono mengatakan BLU tidak bisa mengakuisisi lahan-lahan industri swasta yang sudah berkembang, akibatnya industri tidak mau berinvestasi di kawasan yang tidak berkembang tersebut. Imam kembali menjelaskan bahwa seharusnya hal tersebut dikelola oleh pemerintah, tetapi karena pemerintah tidak punya cukup dana untuk mengelolanya sehingga meminta bantuan swasta adalah solusinya.³⁵

2. Kemampuan pemerintah untuk menambah investasi ke dalam bentuk BUMN semakin berkurang sehingga

[ajak-swasta-kelola-pelabuhan-bukan-jual-bumn-1508226515](#),

diakses 22 Februari 2018.

³⁴ Intan Pratiwi dan Satria K Yudha. 2018. "Sektor swasta di dorong terapkan pembangunan berkelanjutan". *Republika*, 6 September.

Tersedia Online Melalui:

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/09/06/pemwu3416-sektor-swasta-didorong-terapkan-pembangunan-berkelanjutan> diakses 22 Februari 2019.

³⁵ Galih Gumelar. 2016. "BLU dikawasan industri didorong akuisi lahan swasta tahun ini". *CNNIndonesia*, 16 Februari. Tersedia Online Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160216181047-92-111357/blu-kawasan-industri-didorong-akuisisi-lahan-swasta-tahun-ini>, diakses 22 Februari 2019.

pemerintah setidaknya mengalihkan kepemilikan suatu BUMN kepada swasta dalam bentuk penjualan saham atau masuk modal swasta sehingga BUMN tetap dapat berkembang dan berkompetisi dengan sehat di pasar nasional maupun internasional. Salah satunya BUMN harus melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau penjualan saham perdana untuk mendapatkan modal yang sangat besar sebagai pengembangan perusahaan.

Direktur penilaian perusahaan BEI Samsul Hidayat mendorong BUMN maupun anak usahanya yang lain agar menggunakan pasar modal untuk sumber pendanaan, selain itu menurut Samsul dengan *Go Public* BUMN bisa mandiri mencari pendanaan dan tidak bergantung kepada pemerintah dengan begitu BUMN maupun anak usahanya bisa berkembang serta meningkatkan sistem penerepan *Good Corporate Governance* (GCG). Demikian lanjut Samsul ketika BUMN sudah *Go Public* pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan BUMN karena menurut anggaran dasar BUMN pemerintah masih bisa mengatur kewenangannya dan tetap mengendalikan BUMN walaupun sudah di porsi publik.³⁶

Namun agar BUMN bisa masuk ke modal swasta harus melalui proses yang panjang dan rumit. Menurut direktur utama BEI Tito Sulistio mengatakan bahwa sedikitnya ada 25 proses yang harus dilewati BUMN jika ingin melakukan penawaran saham perdana atau IPO di bursa efek Indonesia. Di samping untuk membantu peningkatan modal BUMN, dengan privatisasi melalui IPO dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menikmati hasil keuntungan BUMN.³⁷ Menurut Hatta Rajasa

³⁶ Okezone. 2017. "BEI paparkan keuntungan BUMN *Go Public*". 11 Januari. Tersedia Online Melalui:

<https://economy.okezone.com/read/2017/01/11/278/1589218/bei-paparkan-keuntungan-bumn-go-public>, diakses 23 Februari 2019.

³⁷ *Indopremier*. 2018. "Dorong BUMN *GoPublic*, ini usulan bos BEI". 27 Maret. Tersedia Online Melalui:

<https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Dorong>

jika BUMN sudah terdaftar di bursa maka akan meningkatkan akuntabilitasnya dan transparansinya, karena ada kontrol publik demikian lanjut Hatta bahwa BUMN yang IPO tersebut tidak memberikan sumbangan bagi negara tetapi untuk menyehatkan BUMN itu sendiri dan pemerintah tidak serta meningkatkan target dividen BUMN pada negara.³⁸

Guru besar ekonomi fakultas ekonomi Universitas Indonesia (UI) mengatakan jika dengan melakukan penjualan saham BUMN menurutnya adalah langkah awal asing untuk menguasai perusahaan BUMN yang melakukan penjualan saham karena menurutnya privatisasi bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yaitu produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Sedangkan menurut Guru besar fakultas hukum UI Erman Rajagukguk mengatakan bahwa wajar saja jika asing ikut terlibat dalam pembelian saham atau penanaman investasi jika tidak ada kepedulian dari pihak dalam negeri untuk menanamkan sahamnya atau berinvestasi kepada BUMN. Selain itu menurut Erman dengan terlibatnya asing dalam melakukan privatisasi maka hal tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan karena BUMN yang menurutnya dapat sehat kembali dengan melakukan privatisasi.³⁹

[BUMN Go Public Ini Usul Bos BEI&news_id=332040&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&tagging_subtype=BUMIM ERUGI&name=&search=y_general&q=saham.%20&halaman=1](https://www.researchnews.go.id/news_detail.php?news_id=332040&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&tagging_subtype=BUMIM&ERUGI&name=&search=y_general&q=saham.%20&halaman=1), diakses 23 Februari 2019.

³⁸ *Kemenkeu*. 2011. "IPO BUMN, tujuh perusahaan segera *Listing*". 19 September. Tersedia Online Melalui: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2810/IPO-BUMN-Tujuh-Perusahaan-Segera-Listing.html, diakses 23 Februari 2019.

³⁹ *Kompas*. 2010. "Penjualan saham BUMN awal asing berkuasa". 29 April. Tersedia Online Melalui:

3. Privatisasi diperlukan untuk sumber dana dalam membantu membiayai APBN. Maksudnya adalah dengan privatisasi, APBN yang mengalami defisit ketika terus memberikan bantuan modal ke BUMN bisa teratasi karena adanya peran swasta dalam menyumbang pemasukan negara. Dahlan Iskan yang pada saat itu menjadi menteri BUMN menjelaskan bahwa peran swasta harus diutamakan karena menyumbang APBN sekitar Rp 100 triliun dari pendapatan negara melalui pajak sedangkan BUMN hanya Rp 28 triliun. Maka dari itu BUMN dan swasta harus besinergi agar ekonomi nasional dapat tumbuh lebih cepat.⁴⁰ Dengan dilakukannya privatisasi maka pemerintah pun akan mendapat dana segar yang bisa dipergunakan untuk modal tambahan BUMN yang di privatisasi, pengembangan usaha, penambahan modal usaha atau keperluan investasi. Dari dana tersebut selebihnya akan dipergunakan pemerintah untuk kepentingan publik dengan menyetorkan sisa dana yang telah digunakan ke kas negara sebagai bentuk APBN.⁴¹

Berdasarkan data penerimaan dana dari privatisasi pada tahun 2006 antara lain: PT. Sarana Multi Finance sebesar Rp 5,2 triliun, PT. Merpati nusantara Airlines sebesar Rp 2,0 triliun,⁴² Sedangkan untuk penerimaan dana privatisasi pada tahun 2005 adalah PT. Telkom sebesar Rp 7,99 triliun,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/29/13323660/penjualan.saham.bumn.awal.asing.berkuasa>, diakses 4 Maret 2019.

⁴⁰ Nancy Junita. 2012. "Pertumbuhan Ekonomi: BUMN didorong jadi penopang Industri dan Perdagangan". *Bisnis*, 17 Januari. Tersedia Online Melalui:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20120117/257/60321/pertumbuhan-ekonomi-bumn-didorong-jadi-penopang-industri-and-perdagangan>, diakses 23 Februari 2019.

⁴¹ Monika Suhayati. 2011. "Kajian Yuridis privatisasi badan usaha milik negara melalui mekanisme penawaran umum (*Initial Public Offering*)". *Negara Hukum*. Vol. 2, No. 1. Hal 60.

⁴² Lestari Kurniawati. 2017. *Esai keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra kreatif. Hal 49.

PT. Antam sebesar Rp 841,94 miliar, PT. Bank BNI sebesar Rp 1,4 triliun, PT. Bank BRI sebesar Rp 3,8 triliun.⁴³

Sumber pendanaan BUMN yang cukup potensial adalah dengan cara melakukan privatisasi agar tidak memberatkan APBN alasannya karena BUMN dimiliki oleh negara sehingga pemerintah harus membantu permodalan BUMN dengan bentuk setoran laba Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dalam setoran laba BUMN dalam PNBP tersebut bisa digunakan untuk membiayai belanja negara seperti belanja pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan kemiskinan). Sebagian besar BUMN di Indonesia mengalami kondisi keuangan yang selalu merugi akibatnya hal tersebut memberatkan APBN. Sehingga privatisasi menjadi jalan pemerintah untuk membantu membiayai APBN agar subsidi yang terus menerus diberikan kepada BUMN dapat berkurang dan dana subsidi bisa dialokasikan ke anggaran belanja pelayanan dasar masyarakat.⁴⁴

Di sisi lain Fuad Bawasier menilai bahwa privatisasi di Indonesia saat ini selalu merugi karena hasil privatisasi selalu menambal defisit APBN selain itu privatisasi bisa merugikan negara jika saham baru yang dilepas ke publik lebih dari 30 persen. Namun menurut Fuad jika privatisasi digunakan untuk meningkat kerja BUMN karena ketika kinerja meningkat dividennya pun naik dan itu yang

⁴³ Ruslan Burhani. 2006. "laba bersih BUMN 2006 akan capai Rp 45 triliun". *Antaranews*, 13 Juli. Tersedia Online Melalui: <https://www.antaranews.com/berita/37892/laba-bersih-bumn-2006-akan-capai-rp45-triliun>, diakses 17 Maret 2019.

⁴⁴ Galuh Kusumastutie S. 2009. "Apakah Privatisasi BUMN selalu tidak nasionalis?". *Kemenkeu*, 12 Juli. Tersedia Online Melalui: <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20090715105353>, diakses 23 Februari 2019.

seharusnya menambal APBN.⁴⁵ Namun menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa privatisasi hanya berkontribusi sedikit untuk APBN, privatisasi hanya menyeter sekitar 1-2,5 persen dari total seluruh APBN dan kontribusi BUMN ke APBN sekitar 6 persen.⁴⁶

Selain itu menurut presiden SBY pada saat pemerintahannya di hadapan anggota DPR mengatakan bahwa privatisasi sebagai sumber pembiayaan APBN memang dirancang sedikit pengaruhnya untuk APBN. Hal itu karena pemerintah menyadari bahwa privatisasi tidak seharusnya menjadi sumber utama dari pembiayaan defisit APBN dan menurut SBY dihadapan dpr menjelaskan bahwa pentingnya penyehatan BUMN dan peningkatan kinerja BUMN yang sesuai dengan UU No. 19 tentang BUMN. Konsep privatisasi untuk penyehatan BUMN ini dirancang pertama pada tahun 2007 setelah sebelumnya privatisasi sepenuhnya hanya untuk membiayai defisit APBN, maka pada tahun 2007 dana dari hasil privatisasi dikembalikan sebagian ke BUMN untuk program kinerja kesehatan BUMN.⁴⁷

D. Pihak yang diuntungkan dari privatisasi

Sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu di lanjutkan dengan kehilangan pemilikan sebuah aset. Artinya negara akan kehilangan salah satu

⁴⁵ *Kompas*. 2008. "Privatisasi BUMN rugikan negara". 17 Maret. Tersedia Online Melalui:

<https://nasional.kompas.com/read/2008/03/17/14132819/privatisasi.bumn.rugikan.negara>, diakses 23 Februari 2019.

⁴⁶ Meutia Febrina Anugerah. 2015. "Privatisasi BUMN tak berikan kontribusi ke APBN". *Okezone*, 9 Januari. Tersedia Online Melalui: <https://economy.okezone.com/read/2015/01/09/320/1089933/privatisasi-bumn-tak-berikan-kontribusi-ke-apbn>, diakses 5 Maret 2019.

⁴⁷ Sugiarto. 2007. *Peran strategis BUMN*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo & BUMN executive. Hal 65

sumber pendapatannya. Akan menjadi lebih merugikan jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipun pabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian dari modal menjadi milik perusahaan asing.⁴⁸

Pihak yang justru diuntungkan dengan privatisasi tersebut adalah investor asing yang membeli saham-saham BUMN yang ditawarkan pada sesi *Initial Public Offering* di lantai bursa. Pihak yang diuntungkan dari privatisasi BUMN tentu saja politisi yang memainkan peran di dalam lingkaran BUMN selain itu ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN, negara juga mendapatkan pemasukan. Andrew Rosser mengidentifikasi beberapa alasan beberapa pihak yang tidak menghendaki penerapan kebijakan privatisasi di Indonesia. Pertama, privatisasi menimbulkan ancaman serius bagi para birokrat politisi yang ada di dalam pengelolaan BUMN karena ada kemungkinan mereka akan digantikan oleh manajer profesional ketika BUMN diprivatisasi. Kedua, hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang mendukung program privatisasi. Pemahaman masyarakat bahwa *private sector* di Indonesia telah mengalami kebangkrutan dan konsekuensinya *private sector* domestik tersebut tidak memiliki ekuitas untuk membeli saham BUMN.⁴⁹

Pengaruh World Bank dan IMF yang tengah mendorong negara-negara berkembang untuk menerapkan kebijakan yang lebih berorientasi pasar dan kebutuhan Indonesia untuk memperoleh dukungan dari kedua lembaga tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari negara industri maju memberi jalan masuk bagi World Bank dan IMF untuk menanamkan pengaruhnya pada kebijakan ekonomi. Di sisi lain, hal tersebut tentu saja membuka akses bagi kelompok

⁴⁸ I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. "Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara setelah dikuasai pihak swasta". *Jurnal IUS*. Volume 5. No. 2. Hal 186.

⁴⁹ Kukuh Fadli Prasetyo. 2012. "Politik Hukum di Bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam undang-undang dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. No. 3. Hal 508-509.

mentri teknokrat terhadap dukungan internasional dalam menerapkan kebijakan deregulasi dan privatisasi. Kondisi anggaran pemerintahan yang semakin terbatas dan dukungan IMF tidak begitu saja memudahkan para pendukung kebijakan privatisasi menjalankan orientasi kebijakan mereka. Karena mereka yang terdiri dari para birokrat dan kelompok militer yang telah menikmati keuntungan besar dari perekonomian perlindungan pasar yang mereka terapkan selama ini masih sangat kuat pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan di puncak pemerintahan.⁵⁰

Pihak yang diuntungkan dari dijualnya Indosat misalkan, menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pemasukan. Kecilnya kepemilikan saham pemerintah hanya sekitar 15% di Indosat, maka potensi pendapatan pemerintah dari Indosat semakin kecil. Selain itu, pajak dari kepemilikan Singapore Technologies Teleme did Pte. Ltd (STT) di Indosat tidak dapat dikenakan, karena STT membeli saham Indosat atas nama Indonesian Communications Limited (ICL) sebuah perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di negara Mauritius (negara yang tidak mengenakan pajak). Dengan berpusat di Mauritius, ICL dapat menghindari dari ketentuan pajak sehingga STT mendapatkan keuntungan yang besar. Status Indosat berganti menjadi PMA yang berarti segala sarana dan prasarana infrastruktur PT Indosat termasuk anak-anak perusahaan telah dimiliki asing. Jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat ke tangan STT maka Indosat berada di bawah kontrol pemerintah Singapura, karena STT yang telah menguasai 41,9% saham Indosat dan Singapore Telecommunication yang menguasai 35% saham Telkomsel keduanya merupakan badan usaha milik pemerintah Singapura.⁵¹

Selain privatisasi, hasil dari *washington consensus* adalah penghapusan subsidi bagi masyarakat terutama di

⁵⁰ Indah Fitriani. 2011. "Pola pengelolaan Badan usaha milik negara sebuah potret singkat". *Manajerial*. Volume 10. No. 19. Hal 65.

⁵¹ Harun dan Dewi Bangun k. 2006. "Divestasi Indosat: Analisis krisis hukum Islam". *Suhuf*. Volume 18. No. 1. Hal 73.

kalangan para petani yang harus bersaing dengan perusahaan asing yang menghasilkan pangan lebih murah dengan kualitas yang sangat bagus karena dikerjakan dengan teknologi yang sudah maju. Kebijakan ini akhirnya menggusur kemampuan para petani kecil sebagai produsen, akibatnya para petani kecil tidak mempunyai pilihan lain kecuali melepaskan sumber alam mereka terutama tanah dan sawah. Hal ini terjadi karena dengan adanya kebijakan akses pasar bebas, beberapa perusahaan asing dengan alasan persaingan global memaksa pemerintah yang menjadi pasien IMF dan Bank Dunia, untuk mengubah kebijakannya dari memberi subsidi kepada petani kecil menjadi subsidi kepada perusahaan agribisnis raksasa, mereka juga menekan pemerintah untuk membebaskan biaya import hasil pertanian mereka, sehingga barang yang di pasarkan jauh lebih murah.⁵²

Dampak yang dirasakan masyarakat ketika privatisasi adalah masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan akan mendapatkan biaya yang mahal di rumah sakit, karena rumah sakit dapat di privatisasi dengan perseroan terbatas (PT) dan ketika rumah sakit tersebut di privatisasi maka tujuannya bukan lagi untuk mengobati tetapi mengejar keuntungan dari pasien agar rumah sakit dapat terus beroperasi. Demikian imbasnya kepada masyarakat golongan menengah karena untuk golongan masyarakat miskin sudah di bantu oleh pemerintah dan dengan begitu jika rumah sakit hanya mengejar keuntungan maka tarifnya pun akan meningkat, sehingga dokter bisa jadi mengesampingkan etika dan melakukan perbuatan yang tidak rasional demi mengejar keuntungan tersebut agar

⁵² Gili Argenti. 2019. "Globalisasi dan dampaknya bagi negara dunia ketiga". *The Indonesian Journal of politics and policy*, Volume 1. No.1. Hal 50.

rumah sakit dapat terus berjalan dan terhindar dari kebangkrutan.⁵³

Bab ini telah menjelaskan kebijakan privatisasi yang dilakukan SBY serta faktor pendorong pemerintah dalam melakukan privatisasi, ditambah dengan para menteri kabinet SBY yang mendukung dan masif untuk melakukan privatisasi dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan pada kenyataannya BUMN yang berpengaruh untuk pendapatan nasional hanya beberapa saja. Pemerintah mempunyai 4 faktor pendukung dalam pelaksanaan privatisasi dan menjadi alasan untuk melakukan privatisasi, dari alasan pemerintah melakukan privatisasi justru yang diuntungkan lebih banyak kepada politisi, swasta, asing, dan orang-orang yang terkait

⁵³ *Depkes*. 2005. "Menkes minta privatisasi rumah sakit ditinjau ulang". 28 Februari. Tersedia Online Melalui: <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?view=print&cid=717&id=menkes-minta-privatisasi-rumah-sakit-ditinjau-ulang>, diakses 7 Maret 2019.